

**KEBANGKITAN SEKOLAH KEJURUAN &
TANTANGAN EKONOMI PASAR BEBAS ASEAN TANPA KENDALI**

Dr Alexander Jebadu

PENDAHULUAN

Pada tempat pertama, kami mengucapkan selamat merayakan pesta lima puluh tahun bagi segenap civitas akademika SMK Sint Gabriel Maumere (1968-2018). Sewaktu diminta untuk menjadi pembicara dalam seminar ilmiah ini, hati kami sontak galau dan ragu. Kegagalan sikap dan keraguan rasa dalam diri kami ini mempunyai dasarnya yang cukup kuat. Kami para dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero, termasuk saya sendiri, meskipun memiliki ijazah *nggete* (bahasa Sikka atau Jawa: *gede*), bukan raja pengetahuan dan ratu kebijaksanaan. Kami tidak tahu semua hal. Lebih dari itu, kami bukan ahli pendidikan, apalagi pendidikan khusus yang disebut sekolah kejuruan (*vocational school* atau *vocational education*). Di STFK Ledalero kami hanya belajar menguasai ilmu Filsafat dan Teologi yang dibantu oleh ilmu-ilmu sosial seperti Sosiologi, Anthropologi, Ilmu Politik umum dan Ilmu Politik Ekonomi-makro.

Selain itu, kami juga tidak mempunyai gambaran tentang SMK Sint Gabriel. Kami tidak memiliki informasi tentang sejarah kelahiran dan perkembangannya, tentang seberapa besar kesuksesan yang diraihinya dalam rentang lima puluh tahun ini dan apa saja tantangan yang dihadapinya selama ini. Sebab itu agak sulit untuk dibuat prediksi bagaimana SMK Sint Gabriel seharusnya mengayun langkah ke dunia masa depan dengan segala tantangan dan peluangnya, baik tantangan dan peluang di tingkat lokal di Kabupaten Sikka, di tingkat regional di Flores atau di NTT dan di tingkat nasional di negara Republik Indonesia.

Dari keterbatasan ini, pada kesempatan ini kami berusaha untuk melayani permintaan seminar ini dengan mempresentasikan fenomena kebangkitan Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan (SMTAK) atau yang lebih singkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), berikut peluang-peluang dan tantangan yang dihadapinya terutama tantangan ekonomi pasar bebas global Asean (MEA, Masyarakat Ekonomi Asean). Dalam presentasi ini saya lebih memilih namanya yang lebih tepat dan benar yaitu Ekonomi Pasar Bebas Asean Tanpa Kendali seperti terpampang sebagai judul dari makalah ini.

PENGERTIAN

Sekolah ini disebut Sekolah Kejuruan atau Pendidikan Kejuruan. Dalam skala pendidikan dasar yang dihitung dari kelas atau tingkat (*grade*) I-XII, maka kurikulum kejuruan ini diberikan pada tingkat atau kelas X, XI dan XII, sehingga disebut Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan (SMTAK) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ini yang membedakannya dari saudara kembarnya Sekolah Menengah Tingkat Atas Umum (SMTAU) – yaitu kejuruan atau keahliannya yang khusus.

Seperti diuraikan oleh Suwati dalam bukunya *Sekolah Bukan untuk Mencari Pekerjaan*, SMK pada prinsipnya merupakan sebuah proses pembelajaran yang terdiri atas kelompok pelajaran produktif, normatif dan adaptif.¹ Di SMK, peserta didik diberi pelajaran teknis dan konkret sampai mereka memiliki keahlian khusus di bidang tertentu sehingga pada saat tamat sekolah kejuruan ini mereka siap bekerja dengan menggunakan keahlian dan ketetrampilannya yang khusus, baik untuk menghidupi diri mereka sendiri maupun untuk menghidupi orang lain di lingkungan sekitarnya.² Tentang kekhususan dari SMK atau MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan) dan yang sekaligus yang membedakannya dari saudara kembarnya SMA, Suwati lebih lanjut menulis:

Anak-anak yang bersekolah di SMK selalu diberikan materi pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan praktis untuk mengembangkan diri dalam kehidupan, bahkan sangatlah diharapkan agar anak-anak didik setelah lulus dapat menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Oleh karena itulah, maka di SMK diberikan materi pembelajaran *kewirausahaan yang di dalamnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan, yaitu langkah berwirausaha, bagaimana seorang melakukan usaha ekonomi* dan sebagainya [italic di sini dari kami].³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para peserta didik di SMK tidak hanya berorientasi memburu pekerjaan yang sudah disiapkan oleh negara, dunia usaha dan industri, tapi juga terutama menjadi pencipta lapangan kerja baru untuk diri mereka sendiri dan orang lain di lingkungan sekitarnya. Seperti tampak jelas dari judul karya akademik Suwati, para peserta didik di SMK tidak mengenyam pendidikan kejuruan ini pertama-tama untuk mencari pekerjaan yang sudah ada di masyarakat, melainkan mereka juga berusaha menciptakan lapangan kerja baru bagi diri mereka maupun bagi orang lain. Dengan kata lain, mereka mesti siap untuk berwirausaha sambil tetap terbuka kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan kejuruannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

DARI DILIHAT “SEBELAH MATA” KE DILIHAT DENGAN “DUA MATA”

Dibandingkan dengan sekarang, pendidikan kejuruan yang demikian mulia umumnya dipandang dengan “sebelah mata” pada masa lalu oleh kebanyakan warga masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Ada banyak fakta dipelbagai belahan dunia yang menunjukkan hal ini. Untuk kepentingan presentasi ini, fenomena yang terjadi seputar sekolah kejuruan di

¹ Suwati tidak menguraikan apa yang dimaksudkan dengan kelompok pelajaran normatif, adaptif dan produktif. Yang dimaksudkan kelompok pelajaran normatif adalah mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Seni Budaya. Dengan kata lain, semua ini adalah mata pelajaran dasar bagi semua siswa sekolah menengah atas untuk membentuk kepribadiannya sebagai seorang warga negara Indonesia. Kelompok pelajaran adaptif terdiri atas mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dan Kewirausahaan. Ini bisa disebut sebagai mata pelajaran penunjang keahlian. Sedangkan kelompok pelajaran produktif adalah mata pelajaran diberikan sebagai Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan. Untuk uraian yang lengkap, lihat Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, hal. 21.

² Suwati, *Sekolah Bukan untuk Mencari Pekerjaan* (Jakarta: Pustaka Grafia, 2008), p.83

³ Ibid, p. 85

Amerika Serikat dan Uni Eropa akan diambil sebagai sampel dan sekaligus sebagai pengantar untuk mencermati kebangkitan sekolah kejuruan di Indonesia.

Sekolah Kejuruan di AS

Di Amerika Serikat (selanjutnya AS), misalnya, sudah sejak awal berdirinya negara ini telah terjadi perdebatan antara dua jenis pendidikan: pendidikan umum (*classical learning* atau *liberal art of education*) yang sekarang ini lebih populer disebut Sekolah Menengah Tingkat Atas Umum (SMTAU) dan pendidikan berbasis kerja (*work-based education*) atau lebih populer disebut Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan (SMTAK) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Thomas Jefferson, presiden ketiga AS (1801-1809) lebih mendukung model pendidikan klasik yang bersifat liberal alias umum atau bebas. Untuk mendukung ide ini ia berpendapat bahwa sejak usia dini para siswa mesti sudah mulai belajar Bahasa Yunani dan Latin, sejarah dunia dan ilmu alam. Benyamin Franklin (1706-1790), salah satu bapak pendiri negara AS, sebaliknya mendukung model pendidikan yang berbasis kerja, magang dan latihan-latihan praktis. Menurut dia, para peserta didik harus sudah sejak dini belajar mengasah ketrampilan dan perdagangan (*skills and trades*) dalam membangun hidupnya sendiri dan bangsa AS.⁴

Dalam sejarah AS selanjutnya, pandangan Thomas Jefferson mempunyai pengaruh lebih kuat. Hal ini tampak dalam kenyataan dominasi sekolah umum di AS, yang lebih menekankan pengetahuan (*academics*) daripada latihan kerja (*career training*). Hal ini juga semakin jelas jika dibandingkan dengan sistem pendidikan dari beberapa negara rekannya di Eropa yang lebih menekankan pendidikan berbasis latihan kerja (*career-based training*) dan magang (*apprenticeship*).⁵

Akan tetapi dalam periode sejarah selanjutnya, model pendidikan berbasis kerja yang diusung Benyamin Franklin dihidupkan lagi oleh pemikir Ralph Waldo Emerson pada tahun 1841 yang berpendapat bahwa kerja tangan (*manual labor*) harus menjadi bagian integral dari pendidikan anak sekolah. Selanjutnya pada tahun 1917, pemerintah Federal AS untuk pertama kali mulai mengalokasikan anggaran negara untuk membiayai pendidikan kejuruan – yang artinya SMK sudah mulai didukung secara resmi oleh pemerintah negara. Hasilnya adalah pada tahun 1982, 1 dari setiap 5 (20%) orang anak di AS memilih untuk mengambil sekolah kejuruan.⁶ Itu artinya mayoritas anak-anak AS (80%) hingga tahun 1980an dan sesudahnya tetap memilih SMTA umum ketimbang SMTA kejuruan.

Hal di atas didukung oleh sebuah kecenderungan cara berpikir warga AS hingga tahun 2011 bahwa semua siswa SMA harus belajar mempersiapkan diri untuk menempuh pendidikan tinggi

⁴ Emily Hanford, “A 21st Century Vocational High School”, in *American RadioWorks*, 11th of September 2014. [http:// www.americanradioworks.org/segments/a-21st-century-vocational-high-school/](http://www.americanradioworks.org/segments/a-21st-century-vocational-high-school/) (akses 14 Mei 2018, teks asli tanpa halaman).

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

di universitas sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan hidup di masa depan. Ini juga yang menjadi latar belakang lahirnya semboyan *college for all* di AS hingga tahun 2011. Maksudnya, semua anak-anak AS pada masa ini didorong untuk memilih SMTA Umum yang kemudian harus dilanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi di universitas. Tapi hasil penelitian Bill Symonds yang dipublikasikan pada tahun 2011 dengan judul *Pathways to Prosperity* (Jalan menuju Kesejahteraan Hidup) mengejutkan warga masyarakat AS.

Dalam penelitian ini, Symonds menunjukkan bahwa dari semua anak AS yang mengenyam pendidikan di universitas ternyata hanya 30% saja yang berhasil menamatkan kuliah dengan menyandang gelar sarjana. Sedangkan 70% yang lain *drop out* dalam perjalanan karena pelbagai macam alasan.⁷ Sementara pada saat yang sama, mereka ini tidak begitu mudah untuk memasuki dunia kerja karena ketiadaan keterampilan dan keahlian khusus. Hal ini pada gilirannya menciptakan pengangguran dan selanjutnya mengakibatkan krisis sosial, ekonomi dan politik bagi negara. Sehubungan dengan hal ini, Symonds berpendapat bahwa negara dalam ini gagal menyiapkan generasi muda dengan sebuah model pendidikan yang tidak tepat. Menurut data pasar kerja, kata Symonds, kebanyakan jenis pekerjaan di pasar kerja, seperti manager bangunan, tukang listrik dan teknisi computer, tidak membutuhkan ijazah S1.⁸ Senada dengan Symonds, Laura Brooks juga menggarisbawahi urgensi sekolah kejuruan di AS:

Kita hidup di dunia yang terus berubah dengan cepat, di mana banyak pekerjaan berbasis keterampilan bermunculan yang tidak memerlukan ijazah pendidikan perguruan tinggi yang lamanya 4 tahun itu. Teknologi tidak hanya menginfiltrasi STEM [*science, technology, engineering and math*] dan bidang kesehatan tetapi juga [menginfiltrasi] perdagangan yang membutuhkan lebih banyak waktu sekolah dan sekaligus pelatihan. Dengan menyandarkan diri hanya pada gelar sekolah menengah tradisional [SMTA umum] maka lowongan-lowongan kerja ini bakal tidak akan bisa terisi.⁹

Sejak temuan Bill Symonds, sekolah kejuruan di AS sudah mulai dilihat dengan “dua mata” alias sudah mulai lebih diminati lagi dibandingkan dengan sekolah menengah umum. Di AS saat ini digalakkan dua bentuk pendidikan kejuruan dalam satu paket yang secara populer disebut *Vocational Education and training* atau *Vocational Secondary High School* (Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan) dan Sekolah Pelatihan Keterampilan Kerja. Begitu pentingnya sekolah kejuruan dalam rangka era pasar bebas global ini sampai hampir semua anak AS didorong untuk mengikuti sekolah kejuruan sambil tetap mengikuti sekolah menengah umum tradisional. Hal ini misalnya tampak dalam hal bagaimana sekolah menengah kejuruan ini diatur di setiap negara bagian di AS dalam tiga kemungkinan model berikut: 1) sekolah menengah kejuruan didirikan secara terpisah dan independen dari sekolah menengah umum biasa; 2) sekolah menengah kejuruan dibuat sebagai salah satu sayap dari sekolah menengah umum biasa, dan 3) para siswa

⁷ Berdasarkan yang saya saksikan sendiri secara langsung, mahasiswa/i ini, bahkan siswa/i SMA saja, sering terpaksa drop out dari universitas karena keburuh hamil selama kuliah atau karena kuliah 4 tahun itu terasa terlalu lama.

⁸ Ibid.

⁹ Laura Brooks, “Vocational Education in the 21st Century” dalam <http://www.leap4ed.org/vocational-education-in-the-21st-century/> (akses 14 Mei 2018, teks asli tanpa halaman).

tetap pergi ke sekolah menengah umum biasa (SMA) pada pagi hari dan pada sore hari mereka pergi ke sekolah kejuruan (SMK).¹⁰

Sekolah Kejuruan di Uni Eropa

Di Eropa, sekolah kejuruan telah bertumbuh dan berkembang bersamaan dengan revolusi industri pada abad 17 dan 18¹¹ dan menjadi kunci perkembangan ekonomi industri negara-negara Eropa pada era selanjutnya. Menyadari begitu pentingnya sekolah kejuruan ini bagi kemajuan peradaban Eropa pada umumnya dan kemajuan ekonomi industri mereka pada khususnya, maka pada tahun 1975 mereka mendirikan sebuah pusat studi bersama dalam rangka mengembangkan pendidikan kejuruan dan latihan keterampilan kerja. Lembaga studi ini dikenal dengan singkatan CADEFOP (Perancis: *Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle* atau Inggris: *European Centre for the Development of Vocational Training*) yaitu sebuah Pusat Pengembangan Pelatihan Keterampilan Kerja Eropa yang berkantor pusat di Tesseloniki, Yunani.

CADEFOP bekerjasama dengan Dewan Uni Eropa, pemerintah, perwakilan pengusaha dan serikat kaum buruh, peneliti dan praktisi dari sekolah kejuruan dan pelatihan keterampilan kerja (VET, *Vocational Education and Training*) dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama Eropa. Badan ini meletakkan dasar kebijakan sekolah kejuruan dan pelatihan keterampilan kerja di seluruh Eropa dan mengidentifikasi tren-tren serta tantangan-tantangan bagi VET di seluruh Eropa. Proyeknya meliputi bimbingan dan konseling, pelatihan keterampilan kerja, memprediksi permintaan dan penawaran tenaga kerja terampil, pengakuan dan validasi pelatihan keterampilan kerja yang terjadi di luar sistem pendidikan formal dan pengembangan kerangka-kerangka pendidikan kejuruan lainnya.¹²

Menarik untuk disimak dan dipelajari tiga model klasik sekolah kejuruan dan pelatihan keterampilan kerja di Uni Eropa. Pertama adalah model sekolah kejuruan dan pelatihan keterampilan kerja yang diatur oleh pasar bebas sehingga ia disebut model yang diatur pasar bebas (*liberal market model*). Kedua adalah model sekolah kejuruan dan pelatihan keterampilan kerja yang diatur oleh pemerintah negara atau model yang diatur negara (*state-regulated model*). Ketiga adalah model sekolah kejuruan dan pelatihan keterampilan kerja yang ditentukan baik oleh pasar atau perusahaan maupun oleh pemerintah negara. Ia lasim disebut model

¹⁰ Kate Kelly, "Vocational Education in High School: What You Need to Know" <https://www.understood.org/en/school-learning/choosing-starting-school/finding-right-school/vocational-education-in-high-school>

¹¹ Untuk informasi lengkap, bisa lihat Norbert Wollschläger dan Éric Fries Guggenheim, "A History of Vocational Education and Training in Europe – From Divergence to Convergence," dalam *European Journal of Vocational Training*, Nr.32 May-August 2004/II, hal. 1-17 dan Wolf-Dietrich Greinert, "Mass vocational education and training in Europe Classical models of the 19th century and training in England, France and Germany during the first half of the 20th" dalam *Cadefod Panorama Series* 118/2005.

¹² "European Centre for the Development of Vocational Training". Untuk informasi lebih lanjut, lihat website ini https://en.wikipedia.org/wiki/European_Centre_for_the_Development_of_Vocational_Training

campuran/model ganda (*dual corporate model*),¹³ seperti tampak dalam tabel berikut¹⁴ dengan karakternya masing-masing.

Tiga Model Klasiks Sekolah Kejuruan dan Pelatihan Keterampilan Kerja di Uni Eropa			
	Model yang Diatur Pasar Liberal	Model yang Diatur Pemerintah Negara	Model Campuran/ganda
Siapa yang menentukan pengelolaan pendidikan?	Pasar	Pemerintah negara	Pemerintah dan pasar
Di mana lokasi pendidikan dilaksanakan?	Di sekolah atau langsung di perusahaan	Di sekolah yang disiapkan oleh pemerintah negara	Di sekolah atau langsung di perusahaan
Siapa yang menentukan kurikulum pendidikan?	Pasar kerja atau langsung oleh perusahaan	Pemerintah negara	Pengusaha, serikat buruh dan pemerintah
Siapa yang bayar biaya pendidikan dan pelatihan?	Peserta didik atau lain kali perusahaan	Pemerintah negara (yang diambil dari pajak)	Pemerintah negara dan perusahaan
Apa yang menentukan kualifikasi tamatannya?	Tidak ada ujian sekolah	Ada sertifikat/ijasah yang dikeluarkan oleh negara	Ada sertifikat/ijasah yang dikeluarkan oleh negara

Pada tahun 2000, setahun sebelum menyambut era millennium ketiga yang dimulai tahun 2001, pemerintah Uni Eropa merevitalisasi sekolah kejuruan di seluruh Eropa sebagai sebuah strategi kunci untuk menghadapi tantangan dari sistem ekonomi pasar bebas global saat ini dan menangkap peluang-peluangnya. Negara-negara Uni Eropa bertekad supaya sebelum memasuki tahun 2020, sebahagian besar angkatan kerja dari generasi muda Eropa telah menempuh sebuah pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan kerja. Mereka diharapkan siap untuk menjadi pekerja yang kompetitif di pasar kerja dari ekonomi pasar bebas global.

Hasil sebuah jajak pendapat pada tgl 23 dan 24 Februari 2017 menunjukkan bahwa 70% warga masyarakat Uni Eropa tahu akan keberadaan program VET (*Vocational Education and Training* atau Sekolah Kejuruan dan Latihan Keterampilan Kerja) yang digalakkan oleh pemerintah mereka, 2 dari 3 masyarakat Eropa (68%) berpandangan positif tentang VET dan hampir 9 dari 10 tamatan program VET (87%) puas dengan keterampilan kerja yang telah mereka peroleh dan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan merupakan alasan utama mengapa warga masyarakat Eropa memilih VET¹⁵ alias sekolah kejuruan dan latihan keterampilan kerja. Usaha pemerintah Uni Eropa untuk menggalakan pendidikan kejuruan dan latihan keterampilan kerja menunjukkan buah yang sangat menggembirakan.

¹³ Menurut *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22/2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, pendidikan SMK di Indonesia diselenggarakan dengan menggunakan sistem ganda atau campuran (*dual corporate model*). Misalnya, menurut Permendiknas, materi Dasar pembelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan harus disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian untuk memenuhi standar kompetensi kerja di dunia kerja. Itu artinya, selain pemerintah negara, pengelolaan pendidikan SMK juga ditentukan oleh dunia pasar kerja. Untuk informasi lengkap, lihat *Permendiknas No.22/2006 Sub Pembahasan C, No. 4, hal. 21-22.*

¹⁴ Éric Fries Guggenheim, *Ibid*, hal. 9

¹⁵ VETopinionsurvey, "What do Europeans think of vocational education and training?" <http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/what-do-europeans-think-vocational-education-and-training?NL=67>

SEKOLAH KEJURUAN INDONESIA DAN TANTANGAN PASAR GLOBAL

Bagaimana animo warga masyarakat Indonesia terhadap sekolah kejuruan? Jawabannya bisa diketahui, antara lain, dari kenyataan jumlah SMK di Indonesia yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah SMA. Animo warga masyarakat Indonesia terhadap sekolah kejuruan plus latihan keterampilan kerja masih sangat rendah. Hingga tahun 2005 saja, misalnya, – setelah bangsa ini bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain masuk ke dalam millennium ketiga, rasio jumlah SMK dan SMA di seluruh Indonesia adalah 30:70, menurut sebuah data yang dirilis oleh Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional. Namun setelah digalakkan oleh pemerintah Indonesia, rasio jumlah SMK dan SMA pada tahun 2005 ini telah berubah menjadi 47:53 pada tahun 2008. Pada tahun 2008 itu, pemerintah Indonesia bertekad agar rasio itu menjadi 70:30 pada tahun 2014¹⁶ – sebuah cita-cita yang belum tercapai bahkan hingga tahun 2018 ini.

Sama seperti negara-negara Uni Eropa, ketekatan pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah arah dan muatan pendidikan nasional, terutama pendidikan sekolah kejuruan, dibuat dalam rangka mempersiapkan generasi baru dari angkatan kerja Indonesia untuk menghadapi tuntutan-tuntutan, peluang dan tantangan-tantangan era ekonomi pasar bebas global saat ini. Ketekatan pemerintah Republik Indonesia di bidang ini, misalnya, tampak dalam kebijakan-kebijakan berikut.

Pertama, menurut Undang-Undang No 20/2003, selain dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Mahaesa dan membentuk ahlak yang mulia, kurikulum pendidikan Indonesia bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk masuk ke dalam dunia kerja dengan segala tuntutannya dan mampu berkiprah dalam dunia yang semakin dinamis.¹⁷

Kedua, *Permendiknas No 70/2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan* secara eksplisit menyebutkan latar belakang perubahan kurikulum untuk pendidikan SMK di Indonesia, yang kemudian disebut sebagai Kurikulum 2013, yaitu tantangan internal dan tantangan external. Tantangan internal pendidikan SMK meliputi isi dan standar proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Selain itu, penduduk Indonesia usia produktif (15-65) jauh lebih besar dari usia non produktif (anak-anak dan orang tua) dan diprediksi bahwa pada tahun 2020-2035 penduduk Indonesia yang berusia produktif akan berjumlah 70% dan 30% penduduk Indonesia yang berusia non produktif (anak-anak 0-14 tahun dan orang tua 65 tahun ke atas).¹⁸

¹⁶ “Sekolah Kejuruan Akan Disesuaikan dengan Potensi Daerah,” dalam *Tempo.co* online <https://nasional.tempo.co/read/147346/sekolah-kejuruan-akan-disesuaikan-dengan-potensi-daerah>

¹⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 36 ayat 3) a, b, f dan i.

¹⁸ *Permendiknas No 70/2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan*, hal. 4.

Tantangan external berhubungan dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Menurut pemerintah Indonesia, arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari *agraris dan perniagaan tradisional* menjadi *masyarakat industri dan perdagangan modern* seperti yang dapat dilihat dalam kebijakan ekonomi dunia yang dinakodai oleh *World Trade Organization (WTO)*, masyarakat negara ASEAN, Kerjasama Ekonomi Asia Pasific (*APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation*), dan Masyarakat Ekonomi Asean (*MEA atau AFTA=ASEAN Free Trade Area (AFTA)*) serta masalah pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, dunia investasi, dan transformasi dunia pendidikan.¹⁹

Ketiga, dalam rangka menghadapi tantangan yang dideskripsi oleh Permendiknas No 70/2013 di atas, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan *Instruksi Presiden No 9/Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia*. Dalam instruksi ini, Presiden Republik Indonesia memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan para Gubernur di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing mereka untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia dan menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.²⁰

Data SMK di Indonesia, NTT, Flores dan Sikka

Tingkat Nasional

Bagaimana keadaan SMK di Indonesia, NTT, Flores dan Sikka berhadapan dengan tekat pemerintah Republik Indonesia di atas? Seperti yang dapat dilihat pada Tabel No. 1, pada tahun 2018 ini jumlah SMK Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia lebih besar besar (13.710 atau 50,40%) daripada jumlah SMA Negeri dan Swasta (13.495 atau 49,60%) dengan rasio jumlah siswa 4.904.031 orang (50,62%):4.783.645 orang (49,38%). Dari segi penyelenggara SMK, hingga 2018 ada 74, 33% SMK Swasta dan 25,67% SMK Negeri. Jumlah SMA Negeri (uang sekolah dan prasarana dibiaya negara) dan SMA Swasta hampir berimbang yaitu 49,89%:50,11% tapi rasio jumlah penyebaran siswanya tidak berimbang yaitu 73,07%:26,93%.

VARIABEL	SMK NEGERI	PROSENTASE	SMK SWASTA	PROSENTASE	TOTAL SEK & SISWA
Sekolah	3,519	25,67%	10,191	74,33%	13,710 = 50,40%

¹⁹ Ibid., hal. 5

²⁰ Untuk informasi lebih lengkap, lihat *Instruksi President Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia*.

**Seminar Ilmiah Sehari dalam Rangka Pesta Lima Puluh Tahun SMK Sint Gabriel Maumere, Flores
NTT, Maumere 19 Mei 2018**

Jumlah Siswa	2,110,751	43.04%	2,793,280	56.96%	4,904,031 ²¹ = 50,62%
VARIABLE	SMA NEGERI	PROSENTASE	SMA SWASTA	PROSENTASE	TOTAL SEK & SISWA
Sekolah	6,732	49.89%	6,763	50.11%	13,495 = 49,60%
Jumlah Siswa	3,495,570	73.07%	1,288,075	26.93%	4,783,645 ²² = 49.38%

Tabel 1: Perbandingan jumlah SMK dan SMA di seluruh Indonesia pada tahun 2018

Tingkat Propinsi Nusa Tenggara Timur

Di tingkat propinsi, khususnya Propinsi Nusa Tenggara Timur, cita-cita pemerintah Republik Indonesia untuk menggenjot SMK supaya jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan SMA belum menunjukkan hasil yang menggembirakan seperti tampak pada Tabel 2. Hingga tahun 2018 ini, rasio jumlah SMK dan SMA di Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah 35,16%:64,84% dan rasio jumlah siswa SMK dan SMA adalah 30,27%:69,73%. Hal ini berarti bahwa pemerintah NTT gagal mendukung kebijakan pemerintah pusat ini. Selain itu bisa diketahui, untuk beberapa tahun ke depan, mayoritas penduduk usia produktif di NTT yang tamat sekolah menengah tingkat atas akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau mereka akan masuk ke dunia pasar kerja sebagai angkatan kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan khusus di bidang tertentu. Kemungkinan lain adalah bahwa mereka akan menjadi kelas penganggur.

PROPINSI NTT ²³	JMLH SMKN/S	PROSENTASE	JUMLAH SISWA	PROSENTASE
	276	35,16%	78.618	30,27%
TOTAL	SMAN/S	PROSENTASI	JUMLAH SISWA	PROSENTASI
	509	64,84%	181.128	69,73%
	785	100%	259.746	100%

Tabel 2: Rasio jumlah SMKN/S dan SMAN/S di Propinsi Nusa Tenggara Timur

Tingkat Kabupaten Sikka

Di Kabupaten Sikka, rasio jumlah sekolah SMK dan SMA belum mencapai hasil seperti yang diharapkan pemerintah Republik Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten Sikka pada Tahun Ajaran 2012/2013 yang di-update terakhir pada 11 April 2016, seperti tampak pada Tabel 3,²⁴ adalah 20 SMA (60,61%):13 SMK (39,39%).

²¹ Diolah dari Statistik Pendidikan Kemdikbud, “Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Kejuwaan (SMK) Menurut Status Sekolah Tahun 2017/2018” <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/smk>

²² Diolah dari Statistik Pendidikan Kemdikbud, “Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Kejuwaan (Smk) Tiap Provinsi Status Sekolah: Negeri+Swasta Tahun: 2017/2018” <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/smk>

²³ Diolah dari Statistik Kemdikbud, “Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Atas (Sma) Tiap Provinsi Status Sekolah : Negeri+Swasta, Tahun : 2017/2018” <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/sma>

²⁴ Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, “Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten Sikka, Tahun Ajaran 2012/2013” –update terakhir 11 April 2016, <https://sikkakab.bps.go.id/statictable/2015/05/01/6/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-di-kabupaten-sikka-tahun-ajaran-2012-2013.html>

Tapi yang menarik adalah bahwa walau jumlah SMA masih lebih tinggi, tapi jumlah siswa dari 13 SMK di kabupaten ini lebih tinggi yaitu 51,73% dari jumlah siswa 20 SMA di Kabupaten Sikka yaitu 48,27%.

TKT PENDIDIKAN	JLH SEKOLAH	PROSENTASE	JLH SISWA	PROSENTASE
SMA	20	60,61%	2.861	48,27%
SMK	13	39,39%	3.066	51,73%

Tabel 3: Rasio jumlah SMA dan SMK dan jumlah siswa masing-masing sekolah di Kabupaten Sikka Tahun 2016

SMK dan SMA Sedaratan Flores dan Lembata

Amat menarik untuk melihat peta penyebaran perubahan jumlah SMK dan SMA di daratan Flores dan Lembata. Seperti tampak pada Tabel 4, hanya Kabupaten Lembata yang menunjukkan bahwa jumlah SMK telah lebih tinggi (9 buah atau 56,25%) daripada jumlah SMA (7 buah atau 43,75%). Namun dari segi peta penyebaran siswa, jumlah siswa di SMA (2.319 orang atau 61,06%) masih tetap lebih tinggi dari jumlah siswa di SMK (1.479 orang atau 38,94%). Kabupaten Sikka sebaliknya, meskipun jumlah SMA (20 buah atau 60,61%) lebih banyak dari SMK (13 buah atau 39,39%), tapi jumlah siswa yang memilih SMK (3.066 orang atau 51,73%) lebih besar daripada siswa yang memilih sekolah di SMA (2.861 orang atau 48,27%). Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ende, sebaliknya, masih memiliki lebih banyak SMA (sekitar 70%) daripada SMK (sekitar 30%). Dengan kata lain, ketiga daerah kabupaten ini masih jauh dari keberhasilan untuk memenuhi rencana nasional pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah arah, isi dan jumlah sistem pendidikan Indonesia, yakni jumlah SMK harus lebih banyak daripada jumlah SMA dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan era ekonomi pasar bebas global.

KABUPATEN	SMA/ %	JUMLAH SISWA/%	SMK %	JUMLAH SISWA & %	TOTAL SEKOLAH	TOTAL SISWA
Manggarai Barat	27 = 72,97%	7.901 = 81,39%	10 = 27,03%	2.806 = 28,91%	37	10.707 ²⁵
Manggarai	28 = 73,68%	12.946 = 72,43%	10 = 26,32%	4.927 = 27,57%	38	17.873 ²⁶
Matim ²⁷						
Ngada ²⁸						

²⁵ Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, “Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sederajat dan rasio Guru–Murid menurut Kecamatan Di Kabupaten Manggarai Barat, 2015” – diupdate 5 Mei 2018, <https://manggarai Barat kab.bps.go.id/statictable/2016/08/31/105/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-sekolah-menengah-kejuruan-smk-sederajat-dan-rasio-guru-murid-menurut-kecamatan-di-kabupaten-manggarai-barat-2015.html>

²⁶ Diolah dari Badan Statistik Pusat Kabupaten Manggarai, “Banyaknya Sekolah Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Manggarai – update 24 Agustus 2016” <https://manggarai kab.bps.go.id/statictable/2016/08/24/21/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-menurut-tingkat-pendidikan.html>

²⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur, <https://manggarai timur kab.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3> . BPS Kabupaten Maggarai Timur belum memasukkan data statistik tentang pendidikan.

²⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri dan Swasta Di Bawah Lingkungan Depdiknas Menurut Kecamatan, 2014 / 2015” – update 18 Agustus 2016, <https://ngada kab.bps.go.id/statictable/2016/08/18/26/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-sekolah->

Nagekeo ²⁹						
Ende	27 = 65,85%	9.658 = 70,11%	14 = 34,15%	4.117 = 29,89%	41	13.775 ³⁰
Sikka	20 = 60,61%	2.861 = 48,27%	13 = 39,39%	3.066 = 51,73%	33	5.927 ³¹
Flotim ³²						
Lembata	7 = 43,75%	2.319 = 61,06%	9 = 56,25%	1.479 = 38,94%	16	3.798 ³³

Tabel 4: Rasio jumlah SMA, SMK dan siswa dari kedua sekolah menengah ini di Flores-Lembata hingga 2015.

PENUTUP

Dari presentasi akademik ini, beberapa poin berikut dapat ditarik sebagai kesimpulan. *Pertama*, baik di dunia pada umumnya maupun di Indonesia khususnya sedang terjadi kebangkitan sekolah kejuruan. Dalam rangka percepatan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan bangsa, dan dalam rangka menghadapi tantangan dunia yang berubah secara cepat yang dimotori oleh sains, teknologi dan ekonomi pasar bebas global, maka pemerintah Republik Indonesia – sambil mengikuti tren-tren yang telah dimulai di negara-negara lain seperti Uni Eropa – telah berusaha mengubah arah dan isi pendidikan Indonesia. Perubahan itu, antara lain, adalah hingga tahun 2020 atau sesudahnya, rasio jumlah sekolah kejuruan (SMK) dan SMA mesti menjadi 70:30. Pemerintah bertekad, sekolah kejuruan *alias* SMK yang berorientasi kerja dan pelatihan keahlian sejak tingkah sekolah menengah harus lebih banyak daripada sekolah menengah atas umum atau SMA.

Hingga tahun 2018, di tingkat nasional program ini telah mencapai tingkat keberhasilan dengan rasio 50,40% SMK (dengan jumlah siswa 50,62%) dan 49,60% SMA (dengan jumlah siswa 49,38%). Di Propinsi Nusa Tenggara Timur, program ini masih jauh dari keberhasilan yang diharapkan pemerintah Republik Indonesia. Di daerah-daerah kabupaten di NTT, khususnya Flores dan Lembata, jumlah SMA masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah SMK.

[lanjutan-tingkat-atas-sлта-negeri-dan-swasta-di-bawah-lingkungan-depdiknas-menurut-kecamatan-2014-2015.html](https://www.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3) . Statistik tidak membuat kategori SMTA Umum dan SMTA Kejuruan kecuali SLTA Negeri 5 sekolah dengan jumlah siswa 2.337 orang dan SLTA Swasta 6 sekolah dengan jumlah siswa 1.845 orang.

²⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo, <https://nagekeokab.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3> . belum memiliki data statistik pendidikan yang memadai dan belum ada kategori jumlah SMTA Umum dan SMTA Kejuruan

³⁰ Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende, “Banyaknya Sekolah, Guru Dan Murid Menurut Tingkat Sekolah Di Kabupaten Ende 2013 - diupdate 27 April 2015, <https://endekab.bps.go.id/statictable/2015/04/27/35/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-menurut-tingkat-sekolah-di-kabupaten-ende-2013.html>

³¹ Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, “Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten Sikka, Tahun Ajaran 2012/2013” – update terakhir 11 April 2016. <https://sikkakab.bps.go.id/statictable/2015/05/01/6/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-di-kabupaten-sikka-tahun-ajaran-2012-2013.html>

³² Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, <https://florestimurkab.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3>. BPS Kabupaten Flores Timur belum memasukkan data statistik tentang pendidikan.

³³ Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, “Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid di Bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata Menurut Tingkat Pendidikan 2013” – diupdate 24 April 2015, <https://lembatakab.bps.go.id/statictable/2015/04/24/19/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-di-bawah-dinas-pendidikan-pemuda-dan-olahraga-kabupaten-lembata-menurut-tingkat-pendidikan-2013.html>

Terkecuali daerah Kabupaten Sikka, kendalipun jumlah SMA lebih banyak dari jumlah SMK, tapi jumlah siswa yang memilih sekolah di SMK lebih banyak daripada jumlah siswa yang memilih sekolah di SMA.

Kedua, perubahan arah dan isi kurikulum Indonesia dibuat dalam rangka menghadapi peluang-peluang dan sekaligus tantangan dari era ekonomi pasar bebas global yang sangat kompetitif.

Ketiga, segenap siswa-siswi SMK Katolik Sint Gabriel Maumere dan SMK-SMK lainnya seharusnya berbangga dengan pilihan mengenyam jalur pendidikan kejuruan. Sekolah kejuruan di seluruh dunia dan di Indonesia sedang bangkit. Sangat diharapkan, kalian di SMK Sint Gabriel juga sedang ikut dalam kebangkitan besar ini yaitu kebangkitan Sekolah Kejuruan. Selamat merayakan Pesta Emas sekolahmu. @

BIBLIOGRAFI:

DOKUMEN

Instruksi President Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22/2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,

Permendiknas No 70/2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BUKU & JURNAL

Emily Hanford, "A 21st Century Vocational High School", in *American RadioWorks*, 11th of September 2014.

Norbert Wollschläger dan Éric Fries Guggenheim, "A History of Vocational Education and Training in Europe – From Divergence to Convergence," dalam *European Journal of Vocational Training*, Nr.32 May-August 2004/II

Suwati, *Sekolah Bukan untuk Mencari Pekerjaan* (Jakarta: Pustaka Grafia, 2008), p.83

VETopinionsurvey, "What do Europeans think of vocational education and training?"
<http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/what-do-europeans-think-vocational-education-and-training?NL=67>

Wolf-Dietrich Greinert, "Mass vocational education and training in Europe Classical models of the 19th century and training in England, France and Germany during the first half of the 20th" dalam *Cadefod Panorama Series* 118/2005.

WORLDWIDEBEB

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, "Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sederajat dan rasio Guru–Murid menurut

- Kecamatan Di Kabupaten Manggarai Barat, 2015” – diupdate 5 Mei 2018, <https://manggaraibaratkab.bps.go.id/statictable/2016/08/31/105/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-sekolah-menengah-kejuruan-smk-sederajat-dan-rasio-guru-murid-menurut-kecamatan-di-kabupaten-manggarai-barat-2015.html>
- Badan Statistik Pusat Kabupaten Mangarai, “Banyaknya Sekolah Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Manggarai – update 24 Agustus 2016” <https://manggaraikab.bps.go.id/statictable/2016/08/24/21/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-menurut-tingkat-pendidikan.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur, <https://manggaraitimurkab.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri dan Swasta Di Bawah Lingkungan Depdiknas Menurut Kecamatan, 2014 / 2015” – update 18 Agustus 2016, <https://ngadakab.bps.go.id/statictable/2016/08/18/26/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-sekolah-lanjutan-tingkat-atas-sлта-negeri-dan-swasta-di-bawah-lingkungan-depdiknas-menurut-kecamatan-2014-2015.html> .
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo, <https://nagekeokab.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3> .
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende, “Banyaknya Sekolah, Guru Dan Murid Menurut Tingkat Sekolah Di Kabupaten Ende 2013 - diupdate 27 April 2015, <https://endekab.bps.go.id/statictable/2015/04/27/35/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-menurut-tingkat-sekolah-di-kabupaten-ende-2013.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, “Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten Sikka, Tahun Ajaran 2012/2013” – update terakhir 11 April 2016. <https://sikkakab.bps.go.id/statictable/2015/05/01/6/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-di-kabupaten-sikka-tahun-ajaran-2012-2013.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, <https://florestimurkab.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, “Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid di Bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata Menurut Tingkat Pendidikan 2013” – diupdate 24 April 2015, <https://lembatakab.bps.go.id/statictable/2015/04/24/19/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-di-bawah-dinas-pendidikan-pemuda-dan-olahraga-kabupaten-lembata-menurut-tingkat-pendidikan-2013.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, “Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten Sikka, Tahun Ajaran 2012/2013” –update terakhir 11 April 2016, <https://sikkakab.bps.go.id/statictable/2015/05/01/6/banyaknya-sekolah-guru-dan-murid-di-kabupaten-sikka-tahun-ajaran-2012-2013.html>
- “European Centre for the Development of Vocational Training”. https://en.wikipedia.org/wiki/European_Centre_for_the_Development_of_Vocational_Training
- Kate Kelly, “Vocational Education in High School: What You Need to Know” <https://www.understood.org/en/school-learning/choosing-starting-school/finding-right-school/vocational-education-in-high-school>

Laura Brooks, “Vocational Education in the 21st Century” dalam <http://www.leap4ed.org/vocational-education-in-the-21st-century/>

“Sekolah Kejuruan Akan Disesuaikan dengan Potensi Daerah,” dalam *Tempo.co* online <https://nasional.tempo.co/read/147346/sekolah-kejuruan-akan-disesuaikan-dengan-potensi-daerah>

Statistik Pendidikan Kemdikbud, “Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Status Sekolah Tahun 2017/2018” <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/smk>

Statistik Pendidikan Kemdikbud, “Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Tiap Provinsi Status Sekolah: Negeri+Swasta Tahun: 2017/2018” <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/smk>

Statistik Kemdikbud, “Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Atas (Sma) Tiap Provinsi Status Sekolah : Negeri+Swasta, Tahun : 2017/2018” <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/sma>